

## SISTEM KAMTIBMAS SWAKARSA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL - BUDAYA

Oleh : Mochtar Buchori \*)

### Penjelasan Istilah

Istilah 'sosial-budaya' seringkali kita pergunakan sebagai "keranjang sampah". Kalau dipergunakan bersama-sama dengan istilah 'sosial-politik', dan 'sosial ekonomi', misalnya, maka biasanya istilah 'sosial-budaya' ini lalu diartikan secara negatif: yang bukan 'sosial-budaya' dan bukan pula 'sosial ekonomi', itulah yang dimaksudkan dengan kata 'sosial-budaya'. Maka istilah 'sosial-budaya' pun lalu menjadi suatu istilah yang sangat kabur, yang tidak pernah jelas benar, apa arti dasar (**basic meaning**) yang dikandungnya.

Kekaburan makna pada istilah ini bahkan nampak pada cara kita menuliskan istilah ini. Bagi kebanyakan orang rupanya tidak menjadi persoalan, apakah istilah 'sosial-budaya' ini dituliskan dengan garis penghubung ('-') atau tidak. Begitu pula halnya dengan istilah "sosial-politik" dan sosial-ekonomi". Jadi bagi kebanyakan dari kita rupanya bukanlah merupakan suatu persoalan yang terlalu penting, apakah istilah-istilah 'sosial-politik', 'sosial-ekonomi' dan 'sosial-budaya' kita pergunakan untuk menyatakan satu konsep yang utuh atau kita pergunakan untuk menyatakan dua konsep yang bersambung'.

Pemikiran mengenai hubungan antara Siskamtibmas Swakarsa dan pembangunan di bidang sosial-budaya

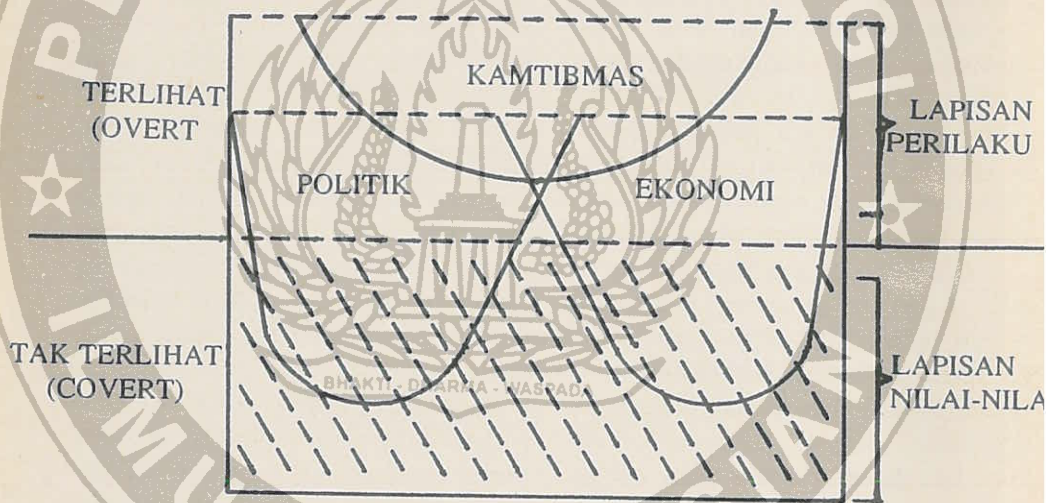
tidak akan pernah bisa berlangsung secara jemih, selama kekaburan konseptual ini kita biarkan berlangsung; selama kita tidak berani menentukan sekalipun secara arbitrer apa yang sebenarnya kita maksudkan dengan istilah 'sosial-budaya' ini. Tanpa kejelasan konseptual ini, semua upaya kita untuk mengidentifikasi intervensi-intervensi sosial-budaya yang harus kita lakukan untuk mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa dalam masyarakat kita tidak akan pernah berhasil. Dan kita pun tidak akan pernah mampu untuk melangkah dengan mantap dan pasti dalam usaha kita mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa ini dalam masyarakat kita. Kita akan bekerja secara spekulatif, secara coba-coba.

Bagi saya, istilah 'sosial-budaya' mengacu kepada keseluruhan tata nilai (**value system**) yang merupakan pengatur endogin dari seluruh perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat di bidang politik dan ekonomi, misalnya, pada dasarnya tidak lain daripada manifestasi dari tata nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula perilaku masyarakat di bidang Kamtibmas atau perilaku birokrasi serta reaksi masyarakat luas terhadap perilaku birokrasi tadi, juga merupakan manifestasi dari tata nilai kolektif yang ada dalam masyarakat tadi. Dengan pemahaman seperti ini, maka is-

tlah 'sosial budaya' saya pandang sebagai suatu konsep yang tempatnya dalam tatanan konsep-konsep terdapat pada satu lapisan lebih dalam daripada konsep 'sosial-ekonomi' dan konsep 'sosial politik. Dan dalam hirarki konsep-konsep ini, perilaku

birokrasi dan perilaku masyarakat dalam bidang Kamtibmas dalam pandangan saya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang telah dibakukan dalam kehidupan sosial-politik dan kehidupan sosial-ekonomi. Gambaran visual dari hierarki nilai-nilai saya sajikan pada Gambar 1.

GAMBAR DENAH



Gambar 1  
Perbandingan Hierarki Antara  
Kehidupan Dalam Bidang Sosial-Budaya,  
Sosial-Politik, Sosial-Ekonomi Dan Kamtibmas



## Kesadaran Bermasyarakat Sebagai Landasan Siskamtibmas Swakarsa

Menurut ketentuan yang disusun oleh MABES POLRI, Siskamtibmas Swakarsa harus dikembangkan berdasarkan dua asas, yaitu :

- (1) bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kepentingan bersama yang harus diupayakan secara bersama pula; dan
- (2) bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa harus merupakan keikutsertaan yang tumbuh dan berkembang atas kehendak masyarakat sendiri.

Dalam pandangan saya, salah satu makna dari ketentuan ini ialah, bahwa kesadaran bermasyarakat lalu kita pandang sebagai landasan dari Siskamtibmas Swakarsa. Tanpa kesadaran bermasyarakat yang cukup tinggi, dalam lingkungan manapun tidak akan dapat ditumbuhkan pandangan, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kepentingan bersama. Begitu pula, tanpa kesadaran bermasyarakat yang cukup tinggi, dalam lingkungan sosial manapun tidak akan pernah muncul kehendak sendiri untuk ikut serta dalam upaya bersama untuk menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas tadi.

Dengan demikian persoalan pertama yang kita hadapi dalam setiap usaha untuk menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa dalam suatu lingkungan sosial menurut penglihatan saya ialah me-

mastikan besar kecilnya kesadaran bermasyarakat yang terdapat dalam lingkungan sosial tadi. Dan ini hanya dapat diketahui dengan memperhatikan cara-cara yang biasa ditempuh oleh lingkungan sosial tadi dalam menjaga kesejahteraan bersama. Dalam sesuatu lingkungan sosial yang kekurangan air, misalnya, cara lingkungan sosial tadi membagi-bagi air yang tersedia merupakan petunjuk yang sangat kuat mengenai tebal tipisnya kesadaran masyarakat yang terdapat dalam lingkungan sosial tadi. Di lingkungan sosial modern seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya, pola pemanfaatan para-bola untuk menangkap siaran-siaran televisi dari luar negeri juga dapat dijadikan petunjuk yang baik mengenai tebal tipisnya kesadaran masyarakat.

Makna 'Kesadaran Bermasyarakat'. Kalau kata 'masyarakat' kita pergunakan sebagai padanan dari kata Inggris *society*, maka arti kata 'masyarakat' ini ialah kumpulan sejumlah manusia, yang selama suatu kurun waktu tertentu bersama-sama menghuni suatu daerah atau kawasan tertentu, dan saling berhubungan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama.

Unsur terpenting dalam definisi ini ialah kata-kata "saling berhubungan". Jadi suatu lingkungan sosial hanya dapat dipandang sebagai suatu masyarakat dalam arti kata sebenarnya, apabila anggota-anggota lingkungan sosial tadi saling mengenal dan saling berhubungan untuk mengatasi per-



soalan-persoalan bersama. Apabila dalam suatu lingkungan sosial anggota-anggotanya tidak saling mengenal dan tidak saling berhubungan, maka lingkungan semacam ini sukar untuk disebut sebagai suatu masyarakat.

Berdasarkan definisi ini, dapat sekarang kita katakan, bahwa 'kesadaran bermasyarakat' ialah pengakuan serta penerimaan terhadap gagasan, bahwa pribadi sendiri berhubungan dengan pribadi-pribadi lain dalam kehidupan sehari-hari, dan bahwa segenap pribadi dari kumpulan pribadi-pribadi tadi mempunyai kewajiban untuk saling berhubungan demi terselesaikannya persoalan-persoalan yang mereka hadapi bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, besar-kecilnya kesadaran bermasyarakat ini dalam suatu lingkungan sosial dapat dilihat dari banyak-sedikitnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sosial tadi, yang didasarkan atas pemikiran bersama, keputusan bersama, serta tindakan bersama. Suatu lingkungan sosial yang sering bertemu dan berembung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan setempat pasti memiliki kedadaran bermasyarakat yang lebih besar daripada suatu lingkungan sosial yang tidak pernah saling bertemu, yang selalu menyerahkan segala sesuatu kepada ketua-ketua RT dan RW.

**Rasa Kebersamaan Sebagai Inti.** Dari analisis-analisis di atas terlihat, bahwa dalam pemikiran saya rasa kebersamaan merupakan inti dari kesadaran bermasyarakat ini. Dapat juga kita gunakan istilah 'solidaritas so-

sial' untuk menyebutkan gejala ini. Tetapi dalam pemikiran saya, 'solidaritas sosial' atau kesetiakawanan sebenarnya merupakan akibat dari 'rasa kebersamaan' ini.

Kalau rasa kebersamaan ini kita pegang sebagai indikator utama untuk mengetahui ada-tidaknya kesadaran bermasyarakat tadi, maka kita ketahui, bahwa di samping masyarakat yang menetap seperti masyarakat dukuh, masyarakat desa, masyarakat kota dan masyarakat daerah, misalnya, terdapat juga apa yang dapat kita sebut sebagai "masyarakat yang mengalir", seperti masyarakat pengemudi truk, masyarakat tunanetra, masyarakat kaum eksekutif, dan sebagainya. Masyarakat-masyarakat yang mengalir seperti ini, seperti halnya dengan masyarakat-masyarakat yang menetap, juga memiliki kadar yang berbeda-beda dalam rasa kebersamaan mereka, dalam kesadaran bermasyarakat mereka.

Kalau gambaran tentang para pengemudi truk antar-kota disajikan oleh film-film asing dapat kita percayai, maka kita akan mendapat kesan, bahwa rasa kebersamaan ini di antara para pengemudi truk antar-kota tadi sangat kuat, lebih kuat daripada rasa kebersamaan yang terdapat di antara para pengemudi bis atau taksi misalnya. Rasanya keadaan semacam ini terdapat di Indonesia. Pengamatan terhadap perilaku para pengemudi truk antar-kota dan terhadap para pengemudi angkutan dalam kota juga akan menimbulkan kesan, bahwa di antara para pengemudi truk antar-



kota rasa ke bersamaan ini jauh lebih kuat daripada dikalangan para pengemudi angkutan dalam kota. Dan rasa kebersamaan antara para pengemudi truk antar-kota serta antara para pengemudi angkutan dalam kota ini saya kira masih lebih besar kalau dibandingkan dengan rasa kebersamaan yang terdapat di antara para eksekutif.

Jadi secara kasar dapat kita katakan rasanya, bahwa "masyarakat pengemudi truk antar-kota" dan "masyarakat pengemudi angkutan kota" benar-benar merupakan suatu masyarakat yang cukup nyata sifatnya, sedangkan apa yang disebut sebagai 'masyarakat kaum eksekutif' sebenarnya bukanlah suatu masyarakat yang cukup nyata. Yang terakhir ini rasanya sukar untuk disebut sebagai 'masyarakat'. Sebuah 'club' mungkin ya, tetapi jelas bukan 'masyarakat'.

Apakah artinya semua ini bagi tugas menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa? Ialah, bahwa dalam melaksanakan tugas ini sebaiknya kita tidak hanya menggarap masyarakat-masyarakat yang bersifat menetap saja, tetapi kita perhatikan pula masyarakat-masyarakat yang bersifat mengalir. Jadi di samping menggarap masyarakat dalam lingkungan RT, RW, kelurahan, dan sebagainya, harus pula kita berikan perhatian yang cukup kepada masyarakat pengemudi metromini, masyarakat pedagang kaki lima, masyarakat pengguna komputer, dan sebagainya. Dalam prinsipnya, setiap satuan sosial yang dapat merupakan

sumber dari gangguan-gangguan Kamtibmas perlu mendapatkan perhatian, pendekatan dan penggarapan.

Berdasarkan segenap analisis ini, dapat kita lihat sekarang, bahwa masyarakat-masyarakat tertentu lebih siap untuk mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa daripada masyarakat-masyarakat lainnya. Masyarakat pedesaan, misalnya, saya kira pada umumnya lebih siap untuk diajak mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa ini daripada masyarakat perkotaan. Dan masyarakat pengemudi truk antar-kota rasanya juga lebih siap untuk mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa ini daripada masyarakat pengemudi metro-mini atau masyarakat pengemudi angkutan kota pada umumnya. Kalau pandangan ini dapat diterima, maka konsekuensinya ialah, bahwa terhadap berbagai jenis masyarakat dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda tadi harus dilakukan pendekatan yang berbeda-beda pula.

### Keamanan Dan ketertiban Dalam Konteks Sosial-Budaya

Dalam pemikiran sosial-budaya atau sosio-kultural, 'keamanan' adalah suatu hal yang berhubungan dengan kemantapan dan kelanggengan eksistensi suatu satuan sosial serta para anggota yang ada di dalamnya. 'Ketertiban' pada lain pihak merupakan sesuatu yang bertalian dengan kepatuhan terhadap segenap ketentuan tentang hidup bersama yang telah disepakati oleh para anggota suatu satuan sosial demi kemantapan dan kelanggengan kehidupan satuan sosial tadi. Jadi dapat dikatakan, bahwa



dalam pemikiran secara sosial-budaya, "ketertiban" merupakan suatu sarana untuk mencapai 'Keamanan'.

Apakah konsekuensi dari pandangan ini? Ialah, bahwa dalam menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa dalam suatu masyarakat pertama-tama para anggota masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu, kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah ada dalam masyarakat tadi untuk mempertahankan serta mempertahankan kehidupan bersama yang ada. Kesepakatan-kesepakatan ini terdiri dari tradisi-tradisi setempat, peraturan-peraturan umum yang disusun baik oleh pemerintah setempat maupun oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, keputusan-keputusan yang diambil dalam pertemuan-pertemuan antara para warga masyarakat, dan sebagainya. Tanpa pengetahuan serta pengertian mengenai segenap kesepakatan ini, akan susah ditumbuhkan kehidupan bersama yang tertib. Dan setelah mengetahui dan memahami segenap kesepakatan yang ada ini masalah selanjutnya ialah membuat setiap warga masyarakat mematuhi segenap kebiasaan, peraturan serta keputusan-keputusan lainnya tadi. Dan ini yang merupakan masalah yang paling sukar.

Kita ambil contoh yang paling sederhana. Kalau kita bepergian dengan pesawat terbang, maka setiap calon penumpang mendapatkan *boarding card*, yaitu semacam tanda izin memasuki pesawat, dan setiap *boarding card* tadi nomor tempat duduk setiap penumpang sudah dituliskan. Tetapi

mengapa kebanyakan calon penumpang masih juga saling berebut kesempatan untuk dapat memasuki pesawat lebih awal daripada penumpang-penumpang lainnya? Saya kira karena pada para calon penumpang tadi ada kekhawatiran, jangan-jangan tempat mereka diserobot penumpang lain. Dan memang hal seperti ini ada kalanya terjadi. Yaitu satu kursi diberikan kepada dua orang penumpang. Tetapi kejadian seperti ini merupakan suatu hal yang langka. Setidak-tidaknya demikianlah seharusnya, dan demikian pula kenyataannya pada perusahaan-perusahaan penerbangan yang baik. Jadi rasa takut, bahwa tempatnya akan diserobot orang lain tadi timbul karena ada keraguan mengenai arti serta kekuatan dari *boarding card* tadi.

Gejala yang lebih kompleks lagi dalam hal ini ialah sukarnya orang Indonesia untuk mematuhi peraturan tentang "antri", peraturan untuk menunggu giliran dilayani dengan berdiri dalam suatu barisan panjang. "Kebandelan" bangsa Indonesia dalam hal ini sudah merupakan suatu pengetahuan umum dalam masyarakat ASEAN, dan saya kira diketahui juga oleh masyarakat-masyarakat asing lainnya. "Antri" untuk membeli karcis, untuk membayar pajak, untuk menerima uang pensiun tidak pernah bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula halnya dengan perbuatan "antri" yang harus dilakukan oleh para pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Atau terjadi rebutan, saling menyerebut, atau terjadi percaloan, atau terjadi kemacetan total. Mengapa ha-



rus demikian? Mengapa kita tidak bisa "antri" dengan tertib seperti orang Singapura, orang Jepang atau orang Korea?

Salah satu sebabnya menurut pemikiran saya ialah karena terlalu banyak orang Indonesia yang memandang dirinya sebagai "perkecualian". Artinya terlalu banyak orang Indonesia yang beranggapan, bahwa ketentuan tentang "antri" ini hanya berlaku untuk orang-orang lain, tetapi tidak berlaku untuk dirinya. Sebabnya ialah karena orang-orang ini memandang dirinya memiliki status istimewa. Baik karena kedudukannya dalam masyarakat, atau karena kekuasaan yang dimilikinya, maupun karena hubungan istimewa yang dimilikinya dengan tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Persepsi demikian tentang diri sendiri ini membuat orang-orang yang bersangkutan merasa dirinya ada di luar masyarakat umum. Mereka merasa, bahwa diri mereka berada di atas masyarakat umum, di atas anggota-anggota masyarakat biasa. Perasaan seperti ini, kalau kita telusuri asal-usulnya, pada akhirnya bersumber pada tipisnya rasa kebersamaan pada orang-orang tadi. Kita lihat dari analisis di atas betapa sentralnya rasa kebersamaan ini bagi pembinaan siskamtibmas swakarsa.

**Aspek Kognitif dan Aspek Konatif Dari Pembinaan Kamtibmas.** Di atas telah saya singgung, bahwa bagian yang paling sukar dari tugas menumbuhkan dan mengembangkan siskamtibmas Swakarsa ini ialah membuat para warga masyarakat benar-be-

nar mematuhi segenap kesepakatan bersama yang ada, setelah mereka mengetahui dan memahami kesepakatan-kesepakatan tadi. Langkah mengetahui dan memahami seluruh tradisi, peraturan dan keputusan yang ada ini disebut sebagai aspek kognitif, sedangkan langkah membuat para warga mau mentaati, mau turut mengamalkan segenap tradisi, peraturan dan keputusan tadi disebut aspek konatif.

Menurut pengamatan saya, dalam praktek-praktek pembinaan masyarakat, biasanya kita kurang memperhatikan pembinaan pada aspek konatif ini, yaitu pembinaan keinginan pada para anggota masyarakat untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Kebanyakan dari kita berhenti pada pembinaan aspek kognitif. Setelah kita merasa, bahwa para anggota masyarakat mengetahui dan memahami segenap ketentuan yang ada, kita merasa, bahwa pekerjaan pembinaan masyarakat telah selesai. Apakah para anggota masyarakat akan benar-benar mengamalkan segenap ketentuan yang telah mereka ketahui tadi kita pandang sebagai suatu persoalan yang lain, persoalan yang terletak di luar kewajiban kita. Keadaan seperti ini tidak hanya terdapat di bidang pembinaan masyarakat saja, tetapi terdapat juga di bidang pendidikan formal dan non formal. Di sanapun, masalah pembinaan konatif ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak cukup diperhatikan.

Suatu pengetahuan atau gnosis dalam bahasa Yunani, hanya akan menjadi suatu amalan atau praxis, apabila pengetahuan tadi diendapkan



dan dicernakan atau dicamkan menurut bahasa Melayu klasik oleh orang atau masyarakat yang bersangkutan. Dan proses mencamkan, proses mengendapkan dan mencernakan inilah yang pada umumnya kita abaikan. Bagaimana caranya melakukan pembinaan konatif ini? Bagaimana caranya mendorong seseorang atau suatu masyarakat untuk menjalani proses mencamkan ini? Bagaimana caranya menumbuhkan keinginan yang kuat pada seseorang atau suatu masyarakat untuk melaksanakan atau mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki?

Sepanjang pengetahuan saya, hal ini pada umumnya dilakukan dengan mengetuk rasa harga diri orang atau masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat kita hadapkan kepada pertanyaan, apa yang ingin mereka perbuat dengan masyarakat mereka; membuat masyarakat mereka menjadi suatu masyarakat yang disegani serta dihormati oleh masyarakat-masyarakat lain, ataukah membiarkan masyarakat mereka menjadi tertawaan serta cemoohan masyarakat-masyarakat lain. Setiap masyarakat dengan rasa kebersamaan yang kuat, setiap masyarakat dengan kesadaran bermasyarakat yang tinggi pasti akan tergugah oleh pertanyaan semacam ini. Mereka akan membulatkan tekad untuk bersama-sama mengangkat martabat masyarakat mereka. Sebaliknya, masyarakat yang tidak diikat oleh rasa kebersamaan yang kuat, masyarakat tanpa kesadaran bermasyarakat yang tinggi akan bersikap masa bodoh mengha-

dapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini.

Kita lihat sekali lagi disini, betapa sentralnya masalah pembinaan rasa kebersamaan, pembinaan kesadaran masyarakat ini bagi tugas menumbuhkan serta mengembangkan Siskantibmas Swakarsa dalam setiap masyarakat.

### Agenda Pembangunan Di Bidang Sosial-Budaya

Apakah agenda kita dalam pembangunan di bidang sosial-budaya ini? Apakah inti dari pembangunan yang kita laksanakan di bidang sosial-budaya? Saya kira pertanyaan ini dapat kita jawab dengan bermacam-macam cara. Dapat kita jawab secara formal dengan mengutip segenap rumusan resmi yang ada, tetapi dapat pula kita jawab secara fungsional dengan mengemukakan fungsi pembangunan sosial-budaya ini dalam rangka mempersiapkan bangsa untuk memasuki masa depan. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri saya, sukar bagi saya untuk memberikan jawaban yang jelas dengan menempuh cara formal-material. Lebih mudah bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini secara fungsional.

Ketika sejumlah pakar ekonomi dan pejabat-pejabat teras di bidang EKUIN mengadakan diskusi mengenai konsekuensi-konsekuensi bagi bangsa Indonesia dari keputusan-keputusan yang diambil di KTT ASEAN IV di Singapura beberapa bulan yang lalu, kesimpulan yang mereka ambil bersama ialah bahwa Indonesia harus melakukan lima langkah dasar untuk dapat menempatkan dirinya sebagai



mitra yang bermartabat terhadap anggota-anggota ASEAN lainnya, dan untuk mencegah dirinya menjadi juru kunci dalam persaingan bebas antar negara ASEAN dalam rangka pelaksanaan AFTA (ASEAN Free Trade Area) nanti.

Kelima langkah itu ialah :

1. meneruskan langkah deregulasi di bidang ekonomi;
2. merasionalisasikan infrastruktur;
3. meniadakan distorsi di sektor riil;
4. membangun etos kerja baru berdasarkan kebudayaan sendiri; dan
5. memperbaiki usaha-usaha di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti pola-pola pengembangan yang lebih relevan daripada yang telah kita laksanakan selama ini.

Kesimpulan nomor (4) dan nomor (5) di atas saya kira pada dasarnya merupakan kesimpulan mengenai apa yang antara lain harus kita lakukan untuk pembangunan sosial-budaya. Dan karena kesimpulan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi yang akan terjadi selama periode realisasi AFTA (1993-2018), maka substansi kesimpulan ini dapat kita gunakan sebagai salah satu acuan untuk merumuskan secara prinsipil agenda pembangunan di bidang sosial-budaya ini untuk jangka waktu 15 tahun mendatang.

Pembaharuan etos kerja pada intinya adalah pembaharuan nilai-nilai tentang kerja. Sedangkan perbaikan-perbaikan di bidang pengembangan sumber daya manusia pada intinya adalah perbaikan mengenai cara-cara

kita membimbing manusia-manusia Indonesia untuk mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya. Perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia ini akan meliputi perbaikan baik dalam cara kita mendidik anak-anak Indonesia di sekolah-sekolah formal, maupun perbaikan dalam cara-cara kita mendidik dan melatih manusia-manusia Indonesia lewat lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Perbaikan-perbaikan di bidang pengembangan sumber daya manusia pada akhirnya harus menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang lebih mampu menjawab tantangan-tantangan jaman, manusia-manusia Indonesia yang lebih tinggi kemampuannya dalam melaksanakan tugas bangsa dibandingkan dengan apa yang dapat kita lihat sekarang ini. Jadi pembangunan sosial-budaya melalui dua agenda ini pembaharuan etos kerja dan perbaikan pengembangan sumber daya manusia pada akhirnya diharapkan menghasilkan manusia-manusia Indonesia baru yang hidup dengan tata nilai yang baru pula.

Penumbuhan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa dalam masyarakat Indonesia menurut penglihatan saya pada akhirnya juga bertujuan melahirkan manusia-manusia Indonesia baru: manusia-manusia Indonesia dengan kepedulian yang lebih besar terhadap kesejahteraan bersama, manusia-manusia Indonesia dengan kesadaran bermasyarakat yang lebih tinggi, dan manusia-manusia Indonesia dengan kemampuan yang lebih tinggi dalam menjaga keamanan



serta ketertiban masyarakatnya. Di samping itu penumbuhan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa, kalau diselenggarakan dengan benar dan baik, juga akan turut melahirkan nilai-nilai baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai tentang kepatuhan terhadap keputusan bersama, tentang keharusan untuk mendahulukan kepentingan bersama, dan tentang pendisiplinan diri sendiri demi kesejahteraan bersama.

Jadi bagaimana hubungan antara Siskamtibmas Swakarsa dengan pembangunan bidang sosial-budaya? Dari cara saya berpikir tadi dapat disimpulkan, bahwa dalam pandangan saya menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa merupakan suatu bagian dari pembangunan di bidang sosial-budaya. Pengembangan Siskamtibmas Swakarsa dalam masyarakat Indonesia rasanya tidak akan dapat terlaksana tanpa pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan tala nilai, dan tanpa perbaikan dalam kualitas manusia Indonesia. Pada dasarnya usaha untuk mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Maka keberhasilan dalam usaha menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa akan lebih terjamin, apabila usaha ini terkaitkan secara fungsional dengan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pembangunan sosial-budaya. Misalnya usaha untuk mengurangi dan mencegah tindak kriminal melalui penggunaan komputer akan lebih berhasil apabila dipertautkan dengan ke-

giatan pendidikan yang dilakukan oleh para pengelola dan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan komputer. Begitu pula untuk meningkatkan disiplin para pengemudi angkutan dalam kota, saya kira sangat diperlukan kerjasama yang cukup erat antara pihak kepolisian dengan lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan mengemudikan mobil dan juga dengan persatuan para pengemudi angkutan dalam kota tadi. Tanpa jaringan kerjasama seperti ini akan sangat sukar untuk menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa ini dalam masyarakat kita.

### Catatan penutup

Sebagai penutup, butir-butir inti dari pemikiran saya ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa dalam setiap masyarakat perlu dimulai dengan penilaian tentang besar-kecilnya kesadaran bermasyarakat yang terdapat di antara para anggota masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran bermasyarakat ini merupakan landasan pokok bagi usaha untuk menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa tadi. Dan inti dari kesadaran bermasyarakat ini ialah rasa kebersamaan yang hidup di antara anggota-anggota masyarakat.
2. Berbagai jenis masyarakat memiliki tingkat kesadaran bermasyarakat yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang cukup siap untuk menerima pembinaan di bidang



Siskamtibmas Swakarsa, tetapi ada pula masyarakat yang belum siap untuk langsung menerima pembinaan di bidang Siskamtibmas Swakarsa. Berdasarkan kenyataan ini, pendekatan yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembinaan tentang Siskamtibmas Swakarsa ini tidak mungkin dilaksanakan secara seragam. Setiap masyarakat harus didekati dengan cara yang sesuai dengan tingkat kesiapan yang dimilikinya.

3. Upaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat-masyarakat yang bersifat menetap seperti masyarakat RT, masyarakat kelurahan, masyarakat kota saja, tetapi dilakukan juga terhadap masyarakat-masyarakat yang bersifat "mengalir" atau *fluid*, seperti masyarakat supir truck, masyarakat pedagang kaki lima, masyarakat pengguna komputer, dan sebagainya.
4. Pembinaan masyarakat untuk pengembangan Siskamtibmas Swakarsa meliputi pembinaan terhadap dua aspek, yaitu pembinaan aspek kognitif dan pembinaan aspek konatif. Pembinaan kognitif ialah pemberian pengetahuan kepada segenap anggota masyarakat mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama yang terdapat dalam masyarakat untuk memantapkan dan mempertahankan kehidupan bersama. Pembinaan konatif ialah usaha membina keinginan dan tekad

pada para anggota masyarakat untuk menjunjung tinggi martabat masyarakat mereka melalui peningkatan kepatuhan terhadap segenap peraturan yang ada, melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

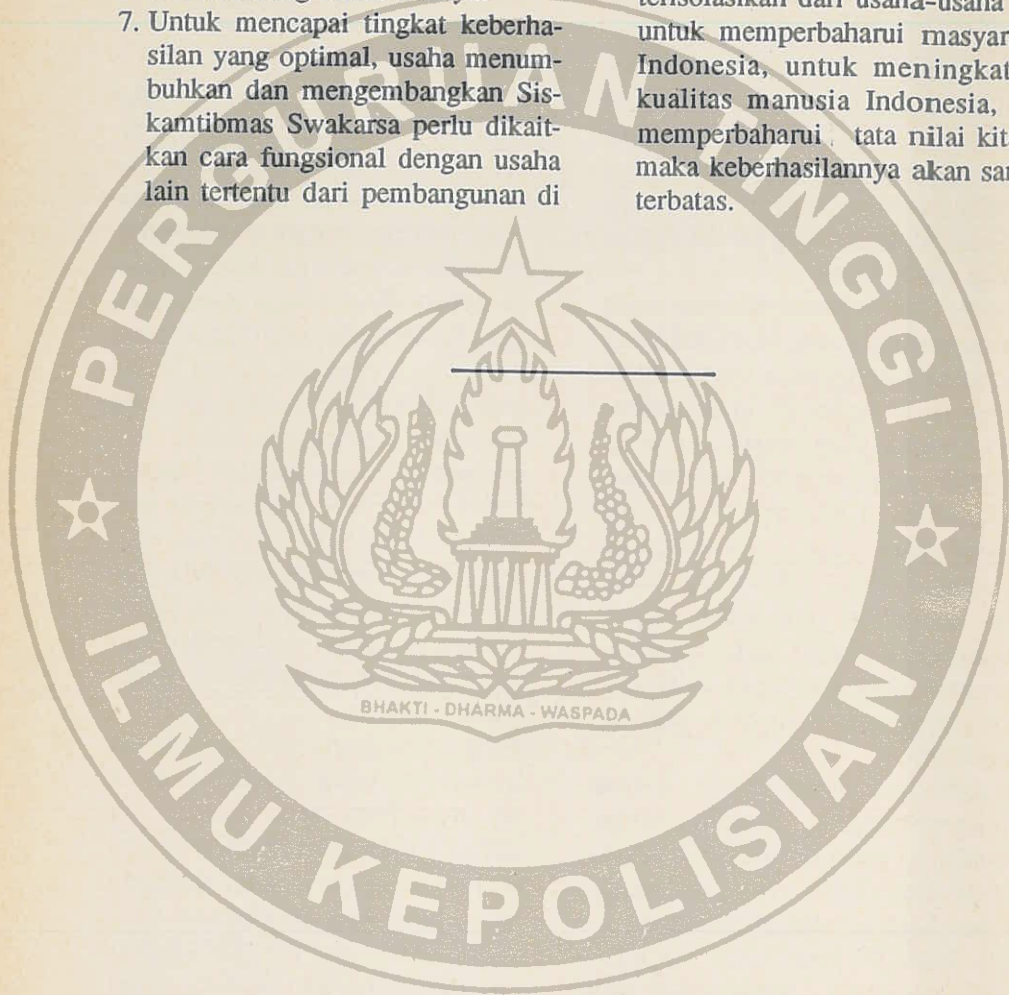
5. Pada prinsipnya, agenda jangka panjang dalam pembangunan di bidang sosial-budaya ialah peningkatan kualitas manusia Indonesia dan pembaharuan nilai-nilai. Martabat kita sebagai bangsa dimasa depan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan kita dalam kedua usaha ini. Kegagalan dalam kedua usaha ini akan membuat bangsa kita tertinggal diperingkat bawah kehidupan bersama diantara bangsa-bangsa ASEAN. Kegagalan meningkatkan kualitas manusia Indonesia akan membuat kita kalah dalam setiap persaingan, sedangkan kegagalan dalam memperbaharui nilai-nilai akan menghambat proses modernisasi.
6. Pengembangan Siskamtibmas Swakarsa yang berhasil pada akhirnya juga akan melahirkan manusia-manusia Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang dapat kita perlihatkan selama ini. Di samping itu, penumbuhan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa, setelah berhasil, juga akan melahirkan nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai tentang kepatuhan terhadap keputusan bersama, tentang pendahuluan kepentingan bersama, dan tentang pendisiplinan diri demi kesejahteraan bersama ja-



di pada dasarnya usaha menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa merupakan suatu bagian dari pembangunan di bidang sosial-budaya.

7. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, usaha menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa perlu dikaitkan cara fungsional dengan usaha lain tertentu dari pembangunan di

bidang sosial-budaya. Bila usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan Siskamtibmas Swakarsa difakukan sebagai suatu usaha yang terisolasikan dari usaha-usaha lain untuk memperbaharui masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan memperbaharui tata nilai kita, maka keberhasilannya akan sangat terbatas.





dalam diri yang bersangkutan ialah "Apa manfaat peranan itu dalam kehidupan saya" artinya, apabila seseorang mempunyai persepsi bahwa dengan memainkan peranan tertentu manfaat bagi dirinya serta keluarganya, tidak akan terlalu sulit untuk menggerakkannya memainkan peranan itu. Sebaliknya, apabila seseorang mempunyai persepsi bahwa memainkan peranan yang diharapkan dari padanya tidak akan menguntungkan, akan timbul kecenderungan baginya untuk berperilaku disfungsi dalam arti tidak atau kurang ikhlas memainkan peranan yang dituntut dari padanya.

Telah dimaklumi bahwa karena sifat hakiki manusia yang dinamis, kebutuhannya pun sangat kompleks, baik dilihat dari segi klasifikasinya maupun dipandang dari sudut pemuasannya. Kebutuhan manusia yang sangat kompleks itu timbul karena "predikat" yang melekat pada dirinya juga beraneka ragam, seperti manusia sebagai insan politik, sebagai makhluk ekonomi, sebagai makhluk sosial tetapi sekaligus sebagai individu dengan jati diri yang khas. Pada tingkat yang sangat mendasar manusia mempunyai kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan perumahan yang pemuasannya dilakukan berdasarkan pendekatan ekonomi. Pada tingkat yang lebih tinggi (Higher level of needs) manusia mempunyai kebutuhan yang menyangkut pengakuan atas harkat dan martabatnya, pengakuan atas hak-hak asasinya, perlakuan yang adil, keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut "nasibnya" dan ber-

bagai kebutuhan lain yang sifatnya politis. Pemuasannya pun memerlukan pendekatan politis pula seperti melalui kehidupan yang demokratis, iklim keterbukaan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan serta tersedianya kesempatan untuk aktualisasi berbagai aspirasinya. Manusia yang juga merupakan makhluk sosial mempunyai kebutuhan afiliasi yang antara lain tercermin dalam interaksi sosial yang diwar-nai oleh ketentraman, saling menghargai dan kehidupan sosial yang serasi. Di samping itu setiap manusia membutuhkan pengakuan akan eksistensinya sebagai individu yang memiliki jati diri yang khas baik berupa kekuatan maupun kelemahan.

Melatarbelakangi segala upaya memuaskan berbagai jenis kebutuhan itu sesungguhnya setiap orang memerlukan rasa aman, bukan hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga dalam arti sosial dan mental psikologis.

**Kedua**, pendekatan keperilakuan yang kontekstual berarti berusaha memahami dan mengenali secara tepat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya dengan pemahaman dan pengenalan faktor-faktor itulah pembinaan dan pengembangan pola perilaku yang positif para warga masyarakat dapat dilakukan. Teori keperilakuan memberi petunjuk bahwa faktor-faktor yang perlu dipahami dan dikenali itu ialah :

- a. latar belakang biografikal,
- b. tingkat pendidikan,



- c. kultur sosial,
- d. kepribadian,
- e. profesi atau pekerjaan yang ditekuni,
- f. status ekonomi, dan
- g. nilai-nilai yang dianut.

**Latar Belakang Biografikal.** Yang dimaksud dengan latar belakang biografikal seseorang mencakup antara lain jenis kelamin, usia, status pernikahan, jumlah tanggungan, suku dan daerah asal. Pengenalan faktor-faktor tersebut akan mempermudah usaha menentukan bentuk peranan yang diharapkan dimainkan oleh para warga dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara swakarsa.

**Tingkat Pendidikan.** Pemahaman tingkat pendidikan menjadi penting karena terdapat korelasi positif yang tinggi antara tingkat pendidikan seseorang dengan pola perilakunya, termasuk gaya yang digunakan dalam memuaskan berbagai kebutuhannya yang makin kompleks. Dikaitkan dengan perilaku, mestinya tingginya pendidikan seseorang memungkinkan untuk berpikir dan bertindak secara rasional, sehingga dalam interaksinya dengan warga masyarakat lain terlihat pola perilaku yang positif. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya. Bahkan merupakan hal yang ironis bahwa ada anggota masyarakat yang berpendidikan tinggi justru menggunakan daya nalar dan daya kognitifnya untuk lebih menonjolkan pemenuhan haknya, bu-

kan kewajibannya. Padahal interaksi positif yang berwujud apabila terdapat keseimbangan antara keduanya. Akan tetapi meskipun demikian ada peranan tertentu yang dapat diberikan kepada para warga yang berpendidikan relatif tinggi seperti peran yang bersifat pemikiran suatu peran yang tidak dapat diberikan begitu saja kepada setiap orang.

**Faktor-Kultur.** Kultur sosial turut "mewarnai" perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam masyarakat yang mengagumkan individualisme, misalnya, kultur persaingan dapat dikatakan menonjol. Sebaiknya dalam masyarakat yang komunalistik, kebersamaanlah yang diutamakan. Contoh lain ialah bahwa makin tradisional suatu masyarakat, "power-distance" antara yang berkuasa dan dikuasai semakin besar sedangkan semakin maju dan moderen suatu masyarakat, pandangan egalitarianisme makin dominan. Tambahan pula makin tradisional suatu masyarakat, gaya manajerial yang sering dipandang cocok ialah gaya yang paternalistik sedangkan dalam masyarakat yang sudah moderen, didambakan gaya manajerial yang demokratik dengan memperhitungkan faktor situasional. Jelaslah bahwa kultur merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam interaksi seorang warga dengan warga lainnya.

**Kepribadian.** Jika kepribadian diartikan sebagai keseluruhan konfigurasi cara seseorang bereaksi dan berin-



teraksi dengan orang lain, dapat dipas-tikan bahwa setiap orang akan me-nampilkan perilaku yang khas sifat-nya. Seseorang yang berkepribadian "tertutup" akan berperilaku lain dari orang yang sifatnya "terbuka". Seseorang yang serius lain perilakunya dari orang yang santai. Seseorang yang "group dependent" akan berperilaku berbeda dari seorang yang senang "mandiri". Penakut berperilaku lain dari pemberani. Seseorang yang me-nganut paham "Locus of control" in-ternal akan tidak sama perilakunya dengan orang lain yang memandang bahwa "locus of control"-nya bersifat eksternal. Orang yang n.ach-nya (need for Achievement) tinggi tidak bisa disamakan dengan orang yang n.Ach-nya rendah. Demikian seterusnya. Berarti bahwa berbagai tipe kepribadian para warga masyarakat perlu dikenali agar dapat diperkirakan kecenderun-gannya dengan orang lain, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara swakarsa.

**Profesi atau pekerjaan.** Menge-tahui berbagai profesi atau pekerjaan yang ditekuni oleh para warga masya-rakat dalam suatu lingkungan ter-tentu menjadi penting karena berkait-an antara lain dengan bentuk partisipasi yang dapat dan akan diberikan. Juga ada kaitannya dengan komposisi masyarakat, diferensiasi status sosial dan aneka bentuk kemampuan eko-nominya. Secara teoritikal, makin heterogen jenis profesi dan pekerjaan para warga, semakin banyak bentuk

peranan yang dapat diminta dimain-kan oleh para anggota masyarakat yang bermukim di lingkungan tertentu. Artinya heterogenitas masya-rakat merupakan modal penting yang dapat dimanfaatkan.

**Status Ekonomi.** Merupakan ke-nyataan hidup bahwa status ekonomi para warga masyarakat berbeda-beda. Di masyarakat mana pun selalu ada warga yang mampu, bahkan kaya raya, akan tetapi ada pula kurang mampu, bahkan mungkin ada di antaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Membahas status ekonomi dalam kaitannya dengan pemahaman perila-ku para warga dalam interaksinya de-ngan yang lain, termasuk dalam pe-ningkatan partisipasi dalam memeli-hara keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri, bukanlah untuk menonjolkan perbedaan yang ada, melainkan untuk dapat secaralebihcepat mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, baik yang sifatnya menunjang maupun yang mungkin menjadi penghalang. Di samping harus mengupayakan agar perbedaan status ekonomi tidak menjurus ke arah ke-cemburuan sosial yang apabila di-lakukan dengan baik dapat meredam kemungkinan timbulnya gejala so-sial, pemahaman tentang perbedaan status ekonomi itu merupakan bahan penting dalam menentukan berbagai peranan para warga, seperti alokasi beban biaya dalam pemeliharaan ke-amanan dan ketertiban secara swa-karsa. Bahkan sesungguhnya keterli-batan para warga masyarakat dalam



menerapkan Siskamtibmas Swakarsa di lingkungan sendiri dapat dimanfaatkan untuk menggalang solidaritas sosial.

**Nilai-nilai Yang Dianut.** Perilaku seseorang dipengaruhi pula oleh nilai-nilai yang dianutnya. Dari teori keperilakuan diketahui bahwa berbagai nilai yang dikenal dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. nilai ilmiah,
- b. nilai politik,
- c. nilai estetika dan / etika
- d. nilai sosial,
- e. nilai ekonomi, dan
- f. nilai keagamaan.

Nilai "Ilmiah" biasanya dianut oleh mereka yang tergolong sebagai ilmuwan. Diterjemahkan ke pola perilaku seseorang yang menempatkan nilai ilmiah pada peringkat teratas akan berupaya untuk mencari hal-hal baru yang pada akhirnya dimaksudkan untuk memperkaya mutu hidup manusia.

Apabila seseorang menempatkan nilai politik pada peringkat teratas dalam perilakunya akan terlihat berbagai kecenderungan seperti ingin berkuasa, ingin dihormati, pengaruhnya diakui oleh orang lain dan bahkan berupaya agar orang lain bergantung padanya.

Seseorang yang menjadi penganut nilai estetika biasanya mengutamakan hal-hal yang menyangkut keindahan, keasrian, keharmonisan dan segi-segi kehidupan yang berkaitan dengan keindahan tersebut.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesungguhnya akan lebih "nikmat" apabila semakin banyak warga masyarakat yang menganut nilai-nilai sosial. Dikatakan demikian karena nilai-nilai menonjolkan kebersamaan, cinta kepada sesama, berusaha mencegah timbulnya konflik sosial serta memelihara suasana ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal timbulnya konflik, para penganut nilai-nilai sosial akan berusaha mencari penyelesaian yang sifatnya fungsional yang pada gilirannya menumbuhkan kohesi sosial.

Merupakan hal yang wajar, normal dan manusiawi apabila orang menganut nilai ekonomi. Seseorang yang menempatkan nilai ekonomi pada peringkat yang tinggi dalam perilakunya akan menunjukkan kecenderungan mengutamakan efisiensi serta kepraktisan segala tindakannya dan sesuatu yang diperolehnya seperti penghasilannya, kekayaannya, bahkan juga interaksinya dengan orang lain.

Nilai terakhir yang dikenal adalah nilai keagamaan. Para penganut nilai ini mengagungkan kebesaran Tuhan YME atau paling sedikit mementingkan hubungan yang harmonis dengan dunia kosmos. Manifestasi nilai demikian dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sikap jujur, adil, suka mema'afkan kesalahan orang lain dan sebagainya.

Dalam hubungan ini menarik untuk memperhatikan dua hal yaitu pertama bahwa manusia selalu menganut be-



berapa nilai sekaligus dan kedua bahwa tidak mustahil terjadi pergeseran dalam peringkat nilai yang dianut oleh seseorang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang seperti kedudukannya, status sosialnya, jumlah penghasilannya, profesinya, daerah pemukiman tempat tinggalnya serta peranannya dalam masyarakat dapat merubah peringkat nilai-nilai yang dianutnya itu.

### IMPLIKASI OPERASIONAL PENDEKATAN KEPERILAKUAN

Situasi yang ideal ialah apabila seluruh prakarsa untuk mengoperasionalkan Siskamtibmas Swakarsa timbul dari para warga sendiri. Akan tetapi situasi ideal demikian tidak akan terwujud dengan sendirinya. Berarti berbagai aparat pemerintah yang tanggung jawab fungsionalnya meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat seperti Angkatan Bersenjata, terutama Polri, dan aparat pemerintah daerah, terutama pada tingkat kecamatan, kelurahan dengan seluruh jajarannya, masih harus memainkan peranan tertentu.

Sesungguhnya dalam memainkan peranannya, aparat fungsional harus berpegang teguh pada dan berangkat dari paradigma aparat yang bersih dan berwibawa. Berbagai paradigma tersebut seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, loyalitas, transparansi, keterbukaan, kepekaan, keadilan, sikap yang proaktif, kepeloporan, keteladanan, dan sebagainya langsung atau tidak langsung mempunyai relevansi

terhadap pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa.

Paradigma yang secara khusus disoroti dalam makalah ini adalah yang menurut pendapat penulis paling relevan, yaitu paradigma sekaligus peranan selaku katalisator, dinamisator dan sumber informasi yang kesemuanya diterapkan dengan pendekatan situasional.

Peranan selaku katalisator pada dasarnya berkisar pada upaya memperlancar jalannya penentuan berbagai peran yang ditentukan bagi para warga masyarakat. Seperti telah disinggung di muka berbagai peranan masyarakat itu dapat berupa penyediaan dana, waktu dan tenaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Selaku katalisator, aparat fungsional harus mampu melakukan pendekatan yang persuasif dan edukatif, bukan yang punitif. Pemberian informasi dan penjelasan bukan hanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga tentang situasi dan kondisi lingkungan, terutama faktor-faktor kerawanan yang perlu diwaspadai bersama.

Peranan selaku dinamisator yang dituntut dari aparat fungsional berkisar pada peningkatan kegairahan berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan tidak hanya mampu menuntut pemenuhan haknya. Aparatur pemerintah harus mampu menumbuhkan kesadaran yang semakin ting-



gi dikalangan para warga bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan "is everybody's business". Artinya penekanan tentang makna dan hakekat "keswakarsaan" mutlak perlu. Dinamika masyarakat perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga persepsi tentang pentingnya kebersamaan tumbuh semakin subur. Tugasnya melalui peranan selaku dinamisator, aparat fungsional harus mampu menanamkan kesadaran yang semakin tinggi dikalangan para warga bahwa keamanan seseorang dan keluarganya sangat tergantung pada keamanan dan ketertiban lingkungannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara "ke-akuan" harus dibawahkan pada "ke-kita-an". Perilaku yang ego-sentris harus berubah menjadi perilaku yang sosio-sentris.

Peranan selaku sumber informasi menjadi sangat penting karena berbagai perubahan yang terjadi yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berupa peluang, tantangan, hambatan dan bahkan juga ancaman.

Telah ditekankan dimuka bahwa berbagai peranan tersebut dimainkan dengan pendekatan situasional. Pendekatan ini mutlak perlu karena sesungguhnya setiap lingkungan disamping mempunyai kesamaan-kesamaan dengan lingkungan lain, juga memiliki ciri-ciri yang sifatnya khas. Misalnya faktor-faktor situasional yang berpengaruh di suatu kawasan pemukiman di kota berbeda dari kawasan industri di kota yang sama. Faktor-faktor situasional di daerah pe-

desaan tentu lain sifatnya.

Implikasi paling kuat dari pendekatan situasional ialah adanya tuntutan yang mengharuskan aparat fungsional mengenali secara tepat berbagai hal seperti kondisi lingkungan yang menjadi "domainnya", konfigurasi sosial yang ada, komposisi masyarakat, faktor-faktor pendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban secara swakarsa serta berbagai kendala yang mungkin ada harus diatasi.

## PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di muka adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara mantap merupakan prasyarat bagi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tentram dan serasi, yang pada gilirannya memperlancar jalannya pembangunan nasional.
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban setiap warga masyarakat dengan bimbingan, pembinaan dan pengarahan aparat fungsional karena pemeliharaan Kamtibmas "is everybody's business and concern".
3. Demi kesatuan gerak langkah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan suatu pola pembinaan dan pengembangan yang sifatnya nasional yang diciptakan dengan pendekatan yang multidi-



mensional dengan instrumen yang multidisipliner.

4. Suatu pola hanya mempunyai makna apabila pola tersebut dapat dioperasionalkan. Operasionalisasi pola Siskamtibmas Swakarsa menuntut pendekatan dari bawah (grass roots approach) yang sifatnya keperilakuan.
5. Pendekatan keperilakuan pada dasarnya berarti pengenalan yang tepat tentang situasi dan kondisi lingkungan tertentu, komposisi warga serta konfigurasinya, peluang yang ada serta kendala yang mungkin timbul dan harus diatasi.
6. Pada tingkatan yang paling rendah, aparat fungsional harus mampu me-

mainkan peranan tertentu yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kegairahan, kepedulian dan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban secara swakarsa melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban para warga tersebut.

7. Operasionalisasi pola pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa harus dilakukan dengan pendekatan situasional bukan hanya karena setiap lingkungan bersifat khas, akan tetapi juga karena dinamika manusia yang selalu membawa beraneka ragam perubahan.





## LINTASAN PERISTIWA



*Atas Nama Pemerintah - Kapolri telah menyematkan Bintang Bhayangkara Pratama kepada sejumlah Purnawirawan Pati Polri. Tampak Kapolri sedang memberikan ucapan selamat kepada Mayor Jenderal Polisi (Purn) Drs. Djoenarsa, M.A., Waka PPITK dan Pimpinan Harian Majalah Bhayangkara.*





*Siaga Sepeda Motor dan Helikopter Samapta Polri dalam Gelar Pasukan Pam KTT Non Blok*